

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia merupakan salah satu negara berkembang yang menitikberatkan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan ke arah yang lebih baik. Perkembangan Ekonomi ini sudah dimulai dengan adanya bentuk usaha-usaha berskala besar maupun kecil yang amat beragam. Salah satu jenis usaha yang terdapat di Indonesia yaitu Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Kusuma dan Lutfiany, 2018). Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) menjadi salah satu sasaran dan fokus Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) dalam menciptakan stabilitas dan perkembangan ekonomi di wilayah regional ASEAN (Bank Indonesia, 2017).

Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) di Indonesia merupakan salah satu sektor yang sebagian besar diminati oleh masyarakat akhir-akhir ini, terutama dikalangan anak muda. Populasi penduduk dengan usia produktif beberapa tahun ini lebih banyak dari jumlah lapangan kerja yang tersedia, oleh karena itu para pemuda termotivasi untuk menciptakan peluang dengan membuka bisnis. Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) di Indonesia dapat menyerap pengangguran atau setidaknya mengurangi jumlah berbagai pengangguran pada setiap tahunnya (Meidiyustiani, 2016).

Menurut data Bank Indonesia, UMKM merupakan pasar yang sangat potensial bagi industri jasa keuangan, terutama Bank untuk menyalurkan pembiayaan, karena sekitar 60%-70% dari seluruh sektor UMKM belum mempunyai akses pembiayaan melalui pembiayaan (Bank Indonesia, 2017).

UMKM memiliki proporsi sebesar 99,99 % dari total keseluruhan pelaku usaha di Indonesia atau sebanyak 56,54 juta unit. Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah telah mampu membuktikan eksistensinya dalam perekonomian di Indonesia, UMKM masih menjadi tulang punggung perekonomian karena tahan terhadap krisis dan lebih dinamis dari perusahaan besar. Di Indonesia sendiri UMKM berhasil memainkan perannya sebagai pengaman perekonomian nasional pada masa krisis serta menjadi dinamisator pertumbuhan ekonomi Indonesia pasca krisis. Hal ini dikarenakan mayoritas usaha berskala kecil tidak terlalu tergantung pada modal besar atau pinjaman dari luar dalam mata uang asing. Sehingga, ketika ada fluktuasi nilai tukar, perusahaan berskala besar yang secara umum selalu berurusan dengan mata uang asing adalah yang paling berpotensi mengalami imbas krisis. Kontribusi UMKM terhadap perekonomian nasional tentu akan berpotensi besar pula jumlah penerimaan pajak dari sektor tersebut. Perkembangan UMKM di Indonesia dari tahun ke tahun yang semakin meningkat, memberikan peluang kepada pemerintah untuk membidik sektor ini dalam upaya ekstensifikasi pajak. Namun, hal tersebut tidak mudah karena dimungkinkan adanya berbagai penafsiran dari Wajib Pajak UMKM dalam hal perpajakannya. Fakta di lapangan menunjukkan pertumbuhan UMKM tidak seiring dengan jumlah kenaikan penerimaan pajak (DJP, 2009)

Sesuai dengan perkembangan perekonomian di Indonesia, pelaku UMKM banyak menghadapi berbagai masalah, salah satu masalahnya yaitu sulitnya UMKM mendapatkan pinjaman dana yang berupa kredit bank sebagai tambahan modal usaha. Hal ini disebabkan lemahnya Sumber daya manusia (SDM) dalam menyusun laporan keuangan. Kemampuan UMKM dalam menghadapi kemajuan persaingan global memang

sangat diperlukan karena hal ini dapat menjaga kestabilan UMKM dan perekonomian di Indonesia. Sebagian besar UMKM belum cukup tersentuh dengan pelayanan lembaga keuangan formal (bank), sehingga tidak sedikit dari UMKM yang terpaksa memanfaatkan jasa lembaga keuangan mikro tradisional demi mempertahankan kelangsungan hidup usahanya (Badria dan Diana, 2018). Kendala yang dihadapi oleh pelaku UMKM selain modal adalah penerapan manajemen keuangan. Para pelaku UMKM dinilai kurang memahami tentang pembukuan. Pembukuan yang dibuat UMKM selama ini umumnya sederhana dan cenderung mengabaikan pedoman administrasi keuangan sesuai standar (buku). Sehingga perlu dibekali tentang pentingnya menyusun laporan keuangan suatu bisnis, terutama yang sesuai dengan standar (Meidiyustiani, 2016).

Pada tahun 2009 dikeluarkan SAK ETAP, namun standar ini dianggap terlalu kompleks untuk digunakan oleh entitas mikro, kecil, dan menengah sehingga dibutuhkan standar akuntansi yang lebih sederhana. Banyak EMKM yang belum bisa mengaplikasikan SAK ETAP, hal itu dilatarbelakangi oleh kurangnya pelaku EMKM yang mampu menerapkan SAK ETAP, sehingga IAI membentuk kelompok kerja untuk merumuskan sebuah standar dan pada November 2016 diterbitkan SAK EMKM oleh IAI dan efektif SAK EMKM untuk periode tahun buku yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2018.

Diterbitkannya SAK EMKM juga dilandasi kesadaran akan besarnya dukungan sektor tersebut terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia yang terbukti bisa bertahan di saat krisis serta mampu tumbuh pesat ketika ekonomi menggeliat. SAK EMKM dapat membantu UMKM melalui laporan keuangan yang telah dibuat dengan menggunakan

aplikasi pembukuan yang sederhana, menggantikan metode pencatatan keuangan secara tradisional. Namun untuk mendapatkan laporan keuangan yang memadai dan sesuai standar maka masih dibutuhkan sedikit penyempurnaan agar menggambarkan laporan keuangan yang sesuai dengan standar Akuntansi Keuangan (IAI, 2018). Dalam mengesahkan SAK EMKM, DSAK IAI selaku otoritas yang berwenang dalam menyusun standar akuntansi di Indonesia telah melakukan penelitian atas kebutuhan SAK EMKM, melakukan penyusunan draft, menyelenggarakan publik hearing dan mengesahkan exposure draft pada tahun 2016. Lalu setelah melalui proses tersebut DSAK IAI menetapkan SAK EMKM yang akan diberlakukan mulai 1 Januari 2018. Diharapkan dengan diberlakukannya SAK EMKM ini dapat memberikan kemudahan dan dapat digunakan bagi para pelaku UMKM sebagai referensi dalam pembuatan laporan keuangan.

Kebanyakan EMKM ini merupakan para pelaku usaha kecil yang memilih prospek usaha namun terkendala dalam hal akses sumber pendanaan khususnya perbankan, dengan alasan EMKM ini tidak menyusun laporan keuangan yang sesuai dengan standar akuntansi sebagai dasar bagi perbankan atau lembaga keuangan lainnya dalam pemberian pinjaman. SAK EMKM disusun bagi EMKM di Indonesia yang pada tahun 2014 jumlahnya sebanyak 57.9 juta, dan memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 60,34% (Badan Pusat Statistik, 2015).

Beberapa faktor yang mempengaruhi penerapan SAK EMKM berdasarkan dari penelitian sebelumnya diantaranya yaitu pendidikan pemilik, motivasi, persepsi dan sosialisasi (Risky, 2019). Pendidikan dapat diperoleh melalui jalur formal, nonformal dan informal. Pendidikan formal pemilik dapat berpengaruh terhadap pengetahuan tentang

akuntansi, karena seseorang dengan jenjang pendidikan yang lebih tinggi akan mendapatkan materi mengenai akuntansi, terutama apabila seseorang yang telah menempuh pendidikan dengan jurusan akuntansi. Jika tingkat pendidikan formal pemilik atau manager rendah, maka akan rendah penyiapan dan penggunaan informasi akuntansi karena dengan tingkat pendidikan rendah mereka tidak paham tentang akuntansi atau membuat laporan keuangan yang memadai. Hasil Penelitian yang dilakukan oleh Nurita (2016) dan Putu (2017) serta (Zahro dan Sri, 2015) menunjukkan bahwa pendidikan pemilik berpengaruh positif, sedangkan penelitian yang dilakukan (Lestari dan Maswar, 2017) menunjukkan bahwa Pendidikan Pemilik berpengaruh negative terhadap penerapan SAK EMKM. Penelitian yang dilakukan oleh Romi (2018) serta (Hetika dan Nurul, 2018) menunjukkan bahwa pendidikan pemilik tidak berpengaruh terhadap penerapan SAK EMKM.

Faktor lain yang diduga berpengaruh terhadap penerapan SAK EMKM adalah motivasi pemilik. Motivasi merupakan suatu kerelaan untuk berusaha seoptimal mungkin dalam mencapai tujuan organisasi yang dipengaruhi oleh kemampuan usaha untuk memuaskan beberapa kebutuhan individu. Motivasi juga merupakan suatu tindakan yang dapat mendorong seseorang ingin berusaha untuk mencapai tujuan atau sasaran usaha yang dipengaruhi oleh kemampuan usaha untuk memuaskan beberapa kebutuhan individu. Penelitian yang dilakukan oleh Risky (2019), Nurita (2016) serta (Endang dan Rochmi, 2015) menunjukkan bahwa motivasi memiliki pengaruh positif, namun penelitian yang dilakukan oleh Romi (2018) serta Zahro dan Sri (2015) menunjukkan bahwa motivasi memiliki pengaruh negative terhadap penerapan SAK EMKM. Penelitian

yang dilakukan oleh (Lestari dan Maswar, 2017) serta Janrosi (2018) menunjukkan bahwa motivasi tidak memiliki pengaruh terhadap penerapan SAK EMKM.

Faktor berikutnya yang diduga berpengaruh terhadap penerapan SAK EMKM adalah persepsi. Persepsi merupakan pengorganisasian, penginterpretasian terhadap stimulus pada inderanya dan merupakan respon yang integrated dalam diri individu. Persepsi UMKM juga dipengaruhi penggunaan SAK, karena setiap pemilik memiliki persepsi yang berbeda-beda. Sehingga diharapkan pelaku UMKM memiliki persepsi yang baik mengenai penyusunan laporan keuangan. Penelitian yang dilakukan oleh Romi (2018) serta (Badria dan Nur, 2018) menunjukkan bahwa persepsi memiliki pengaruh positif, namun penelitian yang dilakukan oleh Zahro dan Sri (2015) serta Tuti (2014), menunjukkan bahwa persepsi menghasilkan pengaruh negative terhadap penerapan SAK EMKM. Penelitian yang dilakukan oleh Lestari dan Maswar (2017) serta Janrosi (2018) menunjukkan bahwa persepsi tidak memiliki pengaruh terhadap penerapan SAK EMKM.

Faktor terakhir yang diduga berpengaruh terhadap penerapan SAK EMKM adalah sosialisasi tentang SAK EMKM. Sosialisasi dapat dipandang sebagai suatu rangkaian belajar mengajar. Sosialisasi yang dilakukan berfungsi sebagai peran dalam suatu kedudukan atau peranan tertentu yang merupakan hasil dari rangkaian seseorang memperoleh pengetahuan, keterampilan dan sikap (Kusuma dan Lutfiany, 2018). Sosialisasi tentang SAK EMKM merupakan proses individu belajar bagaimana menyesuaikan diri dengan lingkungan tertentu dan bagaimana mengkoordinasikan perilakunya dengan perilaku orang lain dan belajar sesuai dengan peranan dan peraturan yang ditetapkan yakni SAK EMKM. Penelitian yang dilakukan oleh Putu (2017) serta (Lestari dan Maswar, 2017) menunjukkan bahwa sosialisasi memiliki pengaruh positif,

namun penelitian yang dilakukan oleh Zahro dan Sri (2015) serta Janrosl (2018) menunjukkan penelitian bahwa sosialisasi memiliki pengaruh negative terhadap penerapan SAK EMKM. Penelitian yang dilakukan oleh Tuti (2014) serta Hetika dan Nurul, (2018) menunjukkan bahwa sosialisasi tidak memiliki pengaruh terhadap penerapan SAK EMKM.

Melihat fenomena perkembangan umkm dalam menciptakan lapangan pekerjaan serta memberikan suatu kontribusi yang sangat penting dalam ekspor maupun perdagangan, pemerintah kota tegal memberikan beberapa dukungan. Masyarakat kota Tegal juga dikenal memiliki jiwa wirausahadan kreativitas yang tinggi. Menurut data pemerintah kota tegal, dalam rencana pembangunan jangka panjang daerah Kota Tegal, para pelaku umk terus mengalami peningkatan dari taun ke taun. Menurut Kepala Dinas Koperasi, UMKM dan perdagangan Kota Tegal, hasil survai awal pun diperoleh informasi pelaku UMKM di kota tegal masih belum memiliki pengetahuan tentang adanya pencatatan keuangan yang masih sangat berharga, sehingga peneliti tertarik untuk meneliti tentang penerapan SAK EMKM di Kota Tegal.

Dalam penelitian ini mereplikasi kembali penelitian yang dilakukan oleh Romi Eka (2018) yaitu tentang Pengaruh Tingkat Pendidikan, Pemahaman Akuntansi, Motivasi dan Umur Usaha terhadap penerapan SAK EMKM pada Kota Pekanbaru (Studi Empiris pada UMKM di Kota Pekanbaru). Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah Penambahan Variabel Independen yaitu Persepsi Pelaku UMKM, sampel yang digunakan yaitu pada UMKM kota Tegal serta tahun penelitian. Faktor-faktor yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari variabel pendidikan pemilik, motivasi pemilik, persepsi pelaku UMKM serta Sosialisasi SAK EMKM, oleh karena itu penelitian ini

diberi judul **“PENGARUH TINGKAT PENDIDIKAN, MOTIVASI PEMILIK, PERSEPSI DAN SOSIALISASI SAKEMKM TERHADAP PENERAPAN SAKEMKM PADA PELAKU UMKM YANG TERDAFTAR DI DISPERINDAG KOTA TEGAL”**.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka selanjutnya rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu :

1. Apakah Pendidikan Pemilik berpengaruh positif terhadap penerapan SAK EMKM pada UMKM di Kota Tegal ?
2. Apakah Motivasi Pemilik berpengaruh positif terhadap penerapan SAK EMKM pada UMKM di Kota Tegal ?
3. Apakah Persepsi Pemilik UMKM berpengaruh positif terhadap penerapan SAK EMKM pada UMKM di Kota Tegal ?
4. Apakah Sosialisasi SAK EMKM berpengaruh positif terhadap penerapan SAK EMKM pada UMKM di Kota Tegal ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang diharapkan pada penelitian ini yaitu :

1. Untuk mengetahui pengaruh positif dari Pendidikan Pemilik terhadap penerapan SAK EMKM pada UMKM di Kota Tegal.
2. Untuk mengetahui pengaruh positif Motivasi Pemilik terhadap penerapan SAK EMKM pada UMKM di Kota Tegal.

3. Untuk mengetahui pengaruh positif dari Persepsi pemilik UMKM terhadap penerapan SAK EMKM pada UMKM di Kota Tegal.
4. Untuk mengetahui pengaruh positif Sosialisasi SAK EMKM terhadap penerapan SAK EMKM pada UMKM di Kota Tegal.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini yaitu :

1. Manfaat Teoritis
 - a. Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai sarana untuk mengembangkan wawasan dan memberikan sumbangan bagi perkembangan ilmu pengetahuan khususnya tentang faktor-faktor yang mempengaruhi penerapan SAK EMKM pada UMKM.
 - b. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan referensi bagi mahasiswa yang akan melakukan penelitian selanjutnya.
2. Manfaat Praktis
 - a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan suatu masukan bagi Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan di Kota Tegal dalam pengelolaan keuangan UMKM agar sesuai dengan standar ketentuan yang berlaku. Serta diharapkan dapat melakukan sosialisasi dan pelatihan mengenai penyusunan laporan keuangan dengan SAK EMKM kepada para pelaku UMKM.
 - b. Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai tambahan referensi bagi pemilik UMKM tentang penerapan SAK EMKM dalam menyusun laporan keuangan perusahaan.